



**PEMERINTAH  
KOTA MALANG**  
Jalan Tujuh Nomor 1 Malang

MALANGKUCECWARA  
BERMARTABAT



# LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG

**TAHUN 2019**



[www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang



## Kata Pengantar



Syukur Alhamdulillah pertama-tama kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat asas.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 didalamnya memuat informasi kinerja Pemerintah Kota Malang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2019.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja

Malang, 14 Maret 2020  
WALIKOTA MALANG,  
SUTAJI



## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Telah Direviu.....</b>	<b>iv</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>v</b>
<b>Bab I    Pendahuluan .....</b>	<b>I</b>
A. Latar Belakang.....	I
B. Gambaran Umum Pemerintah Kota Malang.....	I
C. Pertumbuhan Ekonomi .....	2
D. Susunan Perangkat Daerah.....	4
E. Sumber Daya Aparatur.....	6
<b>Bab II   Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>7</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 .....	7
B. Strategi Dan Arah Kebijakan .....	14
C. Indikator Kinerja .....	14
D. Perjanjian Kinerja.....	17
E. Parameter Keberhasilan/Kegagalan.....	19

<b>Bab III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>20</b>
	A. Capaian Kinerja	20
	B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	20
	C. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023.....	22
	D. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah.....	25
	E. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya.....	27
	F. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan .....	29
	G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	37
	H. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	40
	I. Realisasi Anggaran	42
<b>Bab IV</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>43</b>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# Pernyataan Telah Direview



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jl.GAJAHMADA No. 2A MALANG, Telp. (0341) 364450-321276  
**MALANG**

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH KOTA MALANG  
TAHUN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang untuk Tahun 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Malang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Malang, 16 Maret 2020

INSPEKTUR KOTA MALANG

  
**Drs. ABDUL MALIK, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610615 198201 1 021

## Ringkasan Eksekutif

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan refleksi dari usaha reformasi birokrasi yang dikelola dengan baik. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Malang selaku penyelenggara negara dan pemerintahan yang bercita – cita mensejahterakan masyarakat serta berupaya dengan berbagai kebijakan dan program yang secara operasional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kinerja yang prima.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 masuk dalam kategori “**BERHASIL**”, karena rata-rata capaiannya 102% dari target. Mayoritas indikator kinerja sudah tercapai dengan baik, walaupun masih ada indikator yang perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD), Indeks Kematangan SPBE, dan Maturitas SPIP yang capaiannya kurang dari 90%. Secara umum capaian kinerja pelaksanaan RPJMD tahun 2018 – 2023 pada tahun pertama ini melebihi dari target.

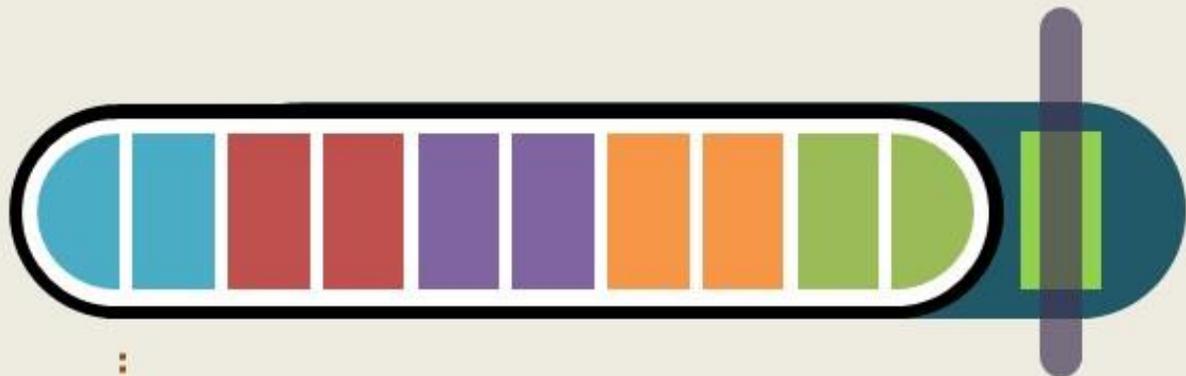
Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang memuat Program dan Kegiatan serta anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp. **1,051,738,518,884.31** dari pagu anggaran Rp. **1,336,486,956,790.42**, sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. **284,748,437,906.11** atau 21,31%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Malang, yang akan terus dipelihara dan akan ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik pada tahun mendatang.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Malang  
Tahun 2019 masuk dalam kategori

**“BERHASIL”**



Rata-rata Capaian  
Target Kinerja 2019

**102%**



Serapan Anggaran 2019

**Rp. 1,051,738,518,884.31**

Efisiensi

**21,31%**

Beberapa Indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya (capaian <90% dari target) pada tahun mendatang antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD), Indeks Kematangan SPBE, dan Maturitas SPIP



# **BAB 01**

# **PENDAHULUAN**

**LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH KOTA MALANG  
TAHUN 2019**



[www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang

# Bab 1

## Pendahuluan

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Walikota untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## B. GAMBARAN UMUM KOTA MALANG



### Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Malang terletak pada 112,06<sup>0</sup> BT - 112,07<sup>0</sup> BT dan 07,06<sup>0</sup> LS - 08,02<sup>0</sup> LS. Adapun secara geografis, letak Kota Malang berbatasan langsung dengan sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, yakni:

- 
 Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
- 
 Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- 
 Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- 
 Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, luas wilayah Kota Malang adalah 114,26 km<sup>2</sup>, yang terbagi atas 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan. Letak Kota Malang pada dataran di atas permukaan laut cukup tinggi, yaitu 445 - 526 meter di atas permukaan laut.



### Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Malang per 31 Desember 2019 sebesar 927.285 jiwa, yang terdiri dari WNA sejumlah 1.219 jiwa dan WNI sejumlah 926.066 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 11.243 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kedungkandang sebesar 220.055 jiwa yang terbagi ke dalam 69.625 Kepala Keluarga (KK), sedangkan Kecamatan Klojen merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni sebanyak 111.053 jiwa yang terbagi ke dalam 37.813 KK, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan**  
**per 31 Desember 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Terhadap Jumlah Penduduk Kota (%)	Jumlah KK
1.	Blimbing	202.514	21,84	65.702
2.	Klojen	111.053	11,98	37.813
3.	Kedungkandang	220.055	23,73	69.625
4.	Sukun	214.650	23,15	69.619
5.	Lowokwaru	179.013	19,31	57.774
<b>Total</b>		<b>927.285</b>	<b>100</b>	<b>300.533</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31 Desember 2019

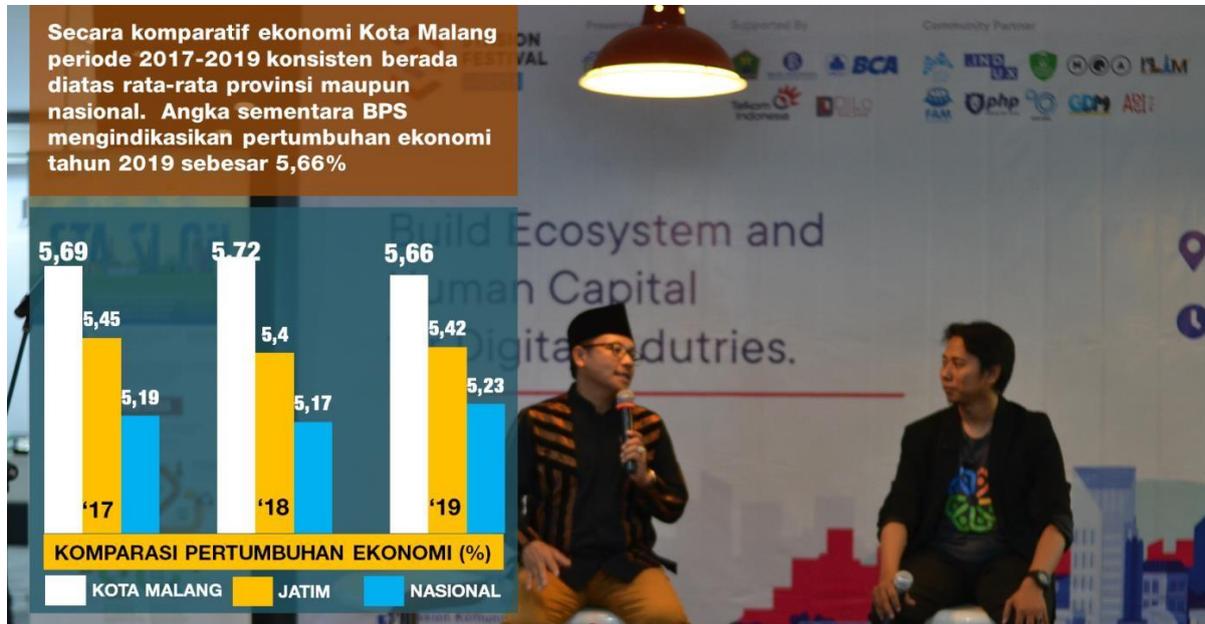


## **Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Kota Malang ditunjang dari berbagai sektor, diantaranya Industri Pengolahan, Perdagangan dan Konveksi. Laju ekonomi Kota Malang merupakan yang terpenting kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang juga terkenal sebagai tempat berkembangnya perusahaan rokok. Di bidang pariwisata, Kota Malang menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang didukung banyaknya akomodasi seperti hotel, rumah singgah (guest house) dan restoran.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,72%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sebesar 5,50% dan nasional sebesar 5,17%. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kontribusi tertinggi pada bidang perdagangan menurut lapangan usaha meliputi bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 29,46%, industri pengolahan sebesar 25,73%, dan konstruksi 12,61%. Seperti diketahui bahwa Kota Malang memiliki beberapa industri besar, sedang dan kecil yang bergerak dalam bidang pengolahan tembakau, jenis industri ini memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan jenis subsektor pengolahan lainnya.

Secara komparatif, pertumbuhan ekonomi Kota Malang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi dalam kurun waktu 2017-2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Selanjutnya inflasi Kota Malang pada tahun 2019 tercatat sebesar 1,93%, atau 1,06 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,98%, sedangkan Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 2,86, dan tahun 2019 sebesar 2,12%. Ada beragam upaya dibalik keberhasilan Kota Malang mengendalikan inflasi, salah satunya adalah pengembangan urban farming dengan melibatkan peran dan pemberdayaan PKK mulai dari tingkat Kota hingga tingkat RT/RW.

### C. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah meliputi 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat Daerah, 6 (enam) Badan Daerah, 13 (tiga belas) Dinas Daerah, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja dan 5 (lima) Kecamatan.

Secara rinci daftar Perangkat Daerah di Kota Malang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Daerah, terdiri dari 6 Badan, yaitu:
  - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Badan Pendapatan Daerah;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Dinas Daerah, terdiri dari 13 Dinas, yaitu:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Kawasan Permukiman;
  - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP;
  - f. Dinas Lingkungan Hidup;
  - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. Dinas Perhubungan;
  - i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - j. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - k. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
  - l. Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
  - m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kecamatan terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Kedungkandang, meliputi 12 Kelurahan;
  - b. Kecamatan Sukun, meliputi 11 Kelurahan;
  - c. Kecamatan Klojen, meliputi 11 Kelurahan;
  - d. Kecamatan Blimbing, meliputi 11 Kelurahan; dan
  - e. Kecamatan Lowokwaru, meliputi 12 Kelurahan.

#### D. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan jumlah 6.973 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.426 orang dan perempuan sebanyak 3.547 orang.



Komposisi Aparatur Kota Malang Menurut Jenis Kelamin



# **BAB 02**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

**LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH KOTA MALANG  
TAHUN 2019**



[www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang

## Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

#### 1. Visi

Berdasarkan kondisi Kota Malang, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Malang Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, sebagai berikut:



Penjelasan dari Visi Bermartabat tersebut adalah sebagai berikut

**KOTA MALANG BERMAH TABAT**

Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “Martabat” menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi " Kota Malang BERMARTABAT" diharapkan dapat terwujud suatu kondisi tatanan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT)

---

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah- tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh- sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya bagi Semua Warga;
2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan;
3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender; dan
4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.



**VISI KOTA MALANG  
BERMARTABAT**

PERDA 1/2019 – RPJMD 2018-2023

**4 MISI**

- 01** MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LAYANAN DASAR LAINNYA BAGI SEMUA WARGA
- 02** MEWUJUDKAN KOTA PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KREATIF, KEBERLANJUTAN DAN KETERPADUAN
- 03** MEWUJUDKAN KOTA YANG RUKUN DAN TOLERAN BERAZASKAN KEBERAGAMAN DAN KEBERPIHAKAN TERHADAP MASY. RENTAN & GENDER
- 04** MEMASTIKAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAY. PEMERINTAH YANG TERTIB HUKUM, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

**4 TUJUAN**

- 01** **LAYANAN DASAR**  
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan lay. dasar lainnya
- 02** **DAYA SAING EKONOMI**  
Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan
- 03** **PEMBANGUNAN INKLUSIF**  
Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender
- 04** **GOOD GOVERNANCE**  
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

**12 SASARAN**

- SASARAN 1 : PENDIDIKAN**
- SASARAN 2 : KESEHATAN**
- SASARAN 3 : DAYA BELI**
- SASARAN 1 : EKRAF**
- SASARAN 2 : INFRASTRUKTUR**
- SASARAN 3 : TATA RUANG & LH**
- SASARAN 1 : PERLIND. SOSIAL**
- SASARAN 2 : PEMBERDAYAAN**
- SASARAN 1 : PENEGAKAN PERDA**
- SASARAN 2 : KELEMBAGAAN**
- SASARAN 3 : MERITOKRASI**
- SASARAN 4 : PEMANFAATAN TI**



### 3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran, yaitu sebagai berikut:

**Tujuan I : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, dengan indikator:**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 81,43;

Sasaran:

1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter, dengan indikator Indeks Pendidikan dengan target 0,77;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dengan indikator Indeks Kesehatan dengan target 0,814; dan
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan, dengan indikator Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity* dengan target 0,847.

**Tujuan 2 : Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan, dengan indikator:**

- 1) Pertumbuhan Ekonomi dengan target 71,10; dan
- 2) Gini Rasio dengan target 0,38.

Sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, dengan indikator Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dengan target 6%;
2. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 3,90; dan
3. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) dengan target 82,92 .

**Tujuan 3 : Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender, dengan indikator:**

- 1) Angka Kemiskinan dengan target 3,91; dan
- 2) Indeks Modal Sosial dengan target 81,36.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial, dengan indikator Persentase Penurunan PMKS dengan target 5%; dan
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan, dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan target 0,836.

**Tujuan 4 : Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, profesional dan Akuntabel, dengan indikator:**

Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 72.

Sasaran:

1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum, dengan indikator Persentase perda yang ditegakkan 25%;
2. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif, dengan indikator:
3. Nilai Sakip dengan target 75,65;
4. Opini BPK dengan target WTP;
5. Maturitas SPIP dengan target 3,50; dan
6. Rasio PAD dengan target 0,24.
7. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN, dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN dengan target 71,46; dan
8. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi, dengan indikator Indeks Kematangan SPBE dengan target 3,8.

**Tabel 2.1**  
**Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Malang**

Misi I		Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga							
Tujuan I		Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,77	0,78	0,79	0,82	0,84	0,87	0,87
2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,814	0,814	0,816	0,818	0,828	0,825	0,825
3.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,845	0,847	0,848	0,850	0,851	0,852	0,852
Misi II		Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan							
Tujuan 2		Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persen tase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	n/a	6	6,1	6,2	6,3	6,45	6,45
2.	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,50
3.	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (LKLHD)	82,15	82,92	83,69	84,46	85,23	86,00	86,00

<b>Misi III</b>		<b>Mewujudkan Kota yang rukun dan toleran berdasarkan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender</b>							
<b>Tujuan 3</b>		<b>Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender</b>							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase penurunan PMKS	2,23%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,836	0,852	0,868	0,884	0,900	0,900
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,25	96,8	96,9	97,0	97,10	97,20	97,20
<b>Misi IV</b>		<b>Memastikan Keluasan Masyarakat atas layanan Pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel</b>							
<b>Tujuan 4</b>		<b>Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel</b>							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah & tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	25%	40%	60%	82%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	70,96	75,65	80,5	82,05	83,05	84,9	84,9
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	3,18	3,5	4	4,1	4,2	4,3	4,3
		Rasio PAD	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	0,33	0,33
3.	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	64,00	71,46	72,92	74,38	75,84	77,10	77,10
4.	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,44	3,8	4,09	4,21	4,45	4,54	4,54

Sumber : RPJMD Kota Malang 2018-2023

## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Malang 2018-2023, dengan menetapkan strategi: Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar, peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan, optimalisasi daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan nonpangan melalui stabilitas harga, optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan usaha mikro, peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas transportasi, perumahan dan permukiman serta ruang terbuka, penerapan konservasi energi, pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, optimalisasi pendampingan pembinaan serta pemberdayaan PMKS secara berkelanjutan, menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan, meningkatkan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), peningkatan layanan publik melalui penataan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan publik efektif, efisien dan proporsional, meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya, dan pengembangan Big data Informasi yang terintegrasi.

Arah kebijakan pembangunan Kota Malang 2018-2023, beserta keterkaitannya dengan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dipilih sebagaimana tercantum dalam BAB VI Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023.

## C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2018 - 2023. Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian tujuan pembangunan meliputi: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Pertumbuhan Ekonomi, (3) Gini Ratio, (4) Angka Kemiskinan, (5) Indeks Modal Sosial, dan (6) Indeks Reformasi Birokrasi.

## 06

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENCAPAIAN TUJUAN

 <p><b>INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)</b> TARGET : 81,43</p>	 <p><b>PERTUMBUHAN EKONOMI</b> TARGET : 5,75%</p>	 <p><b>GINI RASIO</b> TARGET : 0,38</p>
 <p><b>ANGKA KEMISKINAN</b> TARGET : 3,91%</p>	 <p><b>INDEKS MODAL SOSIAL</b> TARGET : 81,36</p>	 <p><b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b> TARGET : 72</p>

Secara rinci IKU tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Malang tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1. Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,43
	1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78
	2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,814
	3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,845
2. Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	5,75%
		Gini Rasio	0,38
	4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6
	5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,90
	6. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,92
	3. Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender		Angka Kemiskinan
		Indeks Modal Sosial	81,36
7. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial		Persentase Penurunan PMKS	5%
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan		Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,836
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,80
4. Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, profesional dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	72
	9. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	25%
	10. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	a) Nilai Sakip;	75,65
		b) Opini BPK;	WTP
		c) Maturitas SPIP; dan	3,5
		d) Rasio PAD.	0,24
	11. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	71,46
12. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	3,8	

## D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.



Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

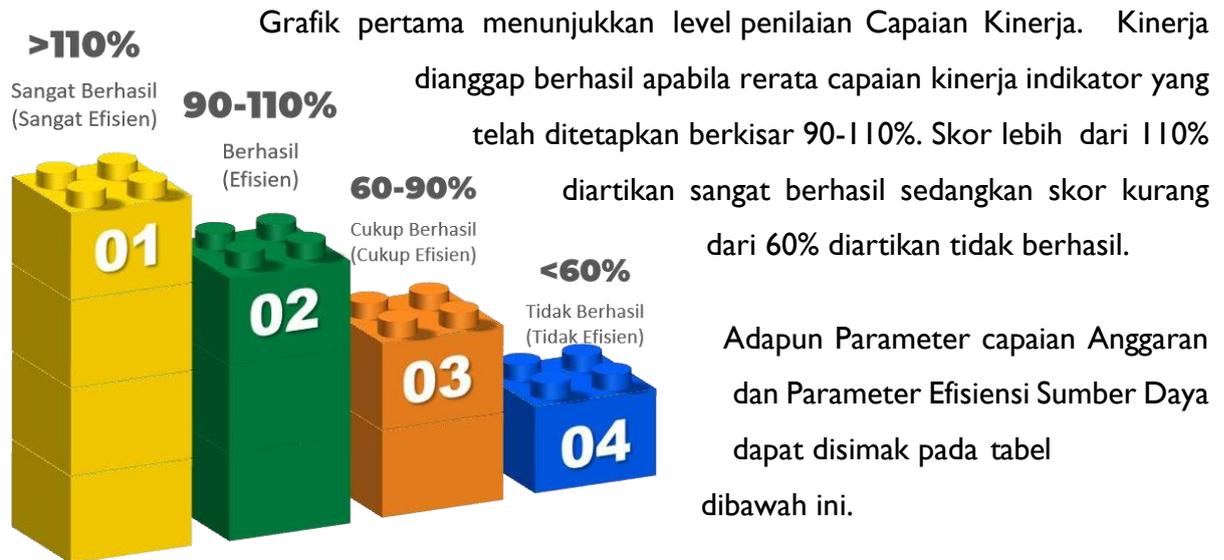
**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
1.	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78	208.611.820.068,00
2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,81	171.902.576.987,02
3.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ Purchasing Power Parity	0,85	6.202.013.700,00
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6%	41.553.060.738,00

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
5.	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,90	303.750.526.196,40
6.	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,92	57.842.881.490,00
7.	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5%	21.930.610.536,00
8.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,836	91.941.674.000,00
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,80	
9.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	25%	13.841.616.000,00
10.	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	75,65	384.049.924.075,00
		Opini BPK	WTP	
		Maturitas SPIP	3,5	
		Rasio PAD	0,24	
11.	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	71,46	13.142.806.000,00
12.	Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	3,8	21.717.447.000,00

## E. PARAMETER KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Terdapat tiga aspek keberhasilan/kegagalan kinerja yang digunakan sebagai cara pengukuran, yakni Capaian Kinerja, Anggaran dan Sumber Daya yang mana parameter penentuan tingkat keberhasilan/kegagalannya dapat disimak dalam infografik berikut ini.



Parameter Keberhasilan/Kegagalan										
Capaian Kinerja				Anggaran			Sumber Daya			
110 keatas sangat berhasil (Sangat Efisien)	90<s.d.110 berhasil (Efisien)	60<=s.d.90 Cukup berhasil (Cukup Efisien)	<60 Tidak berhasil (Tidak Efisien)	>105 Tidak Efisien	105 <=s.d.100 Cukup Efisien	<=99 Efisien	110 keatas Sangat Efisien	100 >=s.d. 110 Efisien	90>=s.d. 100 Cukup Efisien	<90 Tidak Efisien



# **BAB 03**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**

**LAPORAN KINERJA**  
**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**TAHUN 2019**



[www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang

## Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA

Pada bagian pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dalam laporan kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian tahun 2019, terhadap capaian tahun sebelumnya dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 102% dari target. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD), Indeks Kematangan SPBE dan Maturitas SPIP.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kota Malang telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### B. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Capaian kinerja Tahun 2019 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Ket
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78	0,77	98%	
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	100%	
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,85	0,85	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Ket
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6%	8,10%	135%	
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,90	4,06	104%	
6	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,92	65,27	78,71%	
7	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5%	6,81%	136,2%	
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	83,60%	84,63%	101%	
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	96,80	94,71	98%	
9	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	25%	26,37%	105,48%	
10	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	75,65	75	99%	
		Opini BPK	WTP	WTP	100%	
		Maturitas SPIP	3,50	3,045	87%	
		Rasio PAD	0,24	0,30	125%	
11	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	71,46	66,61	93%	
12	Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	3,8	2,85	75%	



Berdasarkan data yang disajikan rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2019 dari 12 (dua belas) Sasaran dan 16 (enam belas) Indikator Sasaran rata-rata mencapai 102%.

### C. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2  
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,77	0,77					98%				
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,81	0,81					100%				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,85	0,85					100%				
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6%	8,10%					135%				
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,75	4,06					104%				
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,15	65,27					79%				
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup												
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	2,23%	6,81%					136,2%				
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	82,00%	84,63%					101%				
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	95,25	94,71					98%				
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	26,37%					105%				
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	68	75,00					99%				
	Opini BPK	WTP	WTP					100%				
	Maturitas SPIP	3,18	3,04					87%				
	Rasio PAD.	0,22	0,30					125%				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	64,00	66,61					93%				
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,44	2,85					75%				

Berdasarkan data pada tabel di atas, tidak dapat dijelaskan penurunan atau peningkatan realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang, karena indikator pada tahun 2018 berbeda dengan indikator sasaran pada tahun 2019, tetapi terhadap realisasi tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Indeks Pendidikan mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 0,0007 dari 0,7642 menjadi 0,7671.
2. Indeks Kesehatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetap tercapai 100% dengan realisasi 0,8140.
3. Indeks Daya Beli/ *Purchasing Power Parity* dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetap tercapai 100% dengan realisasi 0,85.
4. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya tercapai 135% dari 6% menjadi 8,10%.
5. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 0,15 dari 3,75 menjadi 4,06.
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) mengalami penurunan sebesar dari 82,15 menjadi 65,27.
7. Persentase Penurunan PMKS berhasil diturunkan menjadi 6,81% dari target 2,23% (atau mengalami penurunan sebesar 4,58%).
8. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 2,63 dari 82,00 menjadi 84,63.
9. Indeks pembangunan Gender (IPG) mengalami penurunan sebesar 0,54 dari 95,25 menjadi 94,71.

10. Persentase Perda Yang Ditegakkan mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 4,74% dari 21,63% menjadi 26,37%.
11. Nilai SAKIP mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 4,04 dari 70,96 menjadi 75,00.
12. Opini BPK tetap tercapai 100% WTP.
13. Maturitas SPIP mengalami penurunan sebesar 0,14 dari 3,18 menjadi 3,04.
14. Rasio PAD mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 0,08 dari 70,22 menjadi 70,30.
15. Indeks Profesionalisme ASN mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 2,61 dari 64,00 menjadi 66,61.
16. Indeks Kematangan SPBE mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 0,85 dari 2 menjadi 2,85.

#### D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Analisis berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi kinerja yang mengacu pada target jangka menengah RPJMD**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	Capaian
			2023	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,87	0,77	88,51%
2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,825	0,81	98,18%
3.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,852	0,85	99,77%
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%	8,10%	126%
5.	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,5	4,06	90,22%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	Capaian
			2023	2019	
1	2	3	4	5	6
6.	<b>Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	86	65,27	75,90%
7.	<b>Meningkatnya kualitas perlindungan sosial</b>	Persentase Penurunan PMKS	5%	6,81%	136,20%
8.	<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan</b>	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	90,00%	84,63%	94,03%
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,20	94,71	97,44%
9.	<b>Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum</b>	Persentase perda yang ditegakkan	100%	26,37%	26,37%
10.	<b>Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif</b>	Nilai Sakip	84,9	75	88,34%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%
		Maturitas SPIP	4,3	3,04	70,70%
		Rasio PAD	0,33	0,3	90,91%
11.	<b>Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN</b>	Indeks Profesionalisme ASN	77,1	66,61	86,47%
12.	<b>Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi</b>	Indeks Kematangan SPBE	4,54	2,85	62,78%



#### E. REALISASI KINERJA DENGAN MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)/STANDAR NASIONAL LAINNYA

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional
			2019	Target 2019
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,77	-
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,81	-
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,85	-
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	8,10%	-
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,06	-

6	<b>Meningkatnya kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	65,27	
7	<b>Meningkatnya kualitas perlindungan sosial</b>	Persentase Penurunan PMKS	6,81%	
8	<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan</b>	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	84,63%	
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	94,71	
9	<b>Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum</b>	Persentase perda yang ditegakkan	26,37%	-
10	<b>Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif</b>	Nilai Sakip	75,0	80,0
		Opini BPK	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	3,04	3,00
		Rasio PAD	0,30	-
11	<b>Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN</b>	Indeks Profesionalisme ASN	66,61	81
12	<b>Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi</b>	Indeks Kematangan SPBE	2,85	2,6

## F. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2019 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

**Tabel 3.5**  
**Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Predikat Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja			
			110 keatas sangat berhasil	90= $\leq$ s/d 110 berhasil	60= $\leq$ s/d90 Cukup berhasil	<60 Tidak berhasil
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	98%		v		
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	100%		v		
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	100%		v		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	135%	v			
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	104%		v		
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	79%			v	
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	136,20%	v			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Predikat Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja			
			110 keatas sangat berhasil	90= $\leq$ s/d 110 berhasil	60= $\leq$ s/d90 Cukup berhasil	<60 Tidak berhasil
<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan</b>	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	101%		v		
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	98%		v		
<b>Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum</b>	Persentase perda yang ditegakkan	105,48%		v		
<b>Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif</b>	Nilai Sakip	99%		v		
	Opini BPK;	100%		v		
	Maturitas SPIP	87%			v	
	Rasio PAD.	125%	v			
<b>Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN</b>	Indeks Profesionalisme ASN	93%		v		
<b>Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi</b>	Indeks Kematangan SPBE	75%			v	

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran Tahun 2019 kategori berhasil. Namun ada beberapa capaian indikator yang belum mencapai target adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD), Maturitas SPIP dan dan Indeks Kematangan SPBE.

Penyebab turunnya indeks kualitas lingkungan hidup adalah komponen pendukung lingkungan hidup terdiri dari indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks tutupan lahan. Kegiatan /usaha pengendalian air dan B3, pemantauan kualitas udara, dan belum optimalnya pengelolaan sampah.

Untuk level Maturitas SPIP saat ini dengan nilai 3,04 dari target 3,5 Tahun 2019, hal ini disebabkan karena pelaksanaan 5 (lima) unsur SPIP oleh perangkat daerah masih belum optimal. Sedangkan Indeks Kematangan SPBE belum mencapai target disebabkan karena belum optimalnya integrasi sistem informasi manajemen pada perangkat daerah.

Pada Tahun 2020 untuk meningkatkan ketiga indikator tersebut, Pemerintah Kota Malang melaksanakan Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen serta memenuhi target penyelesaian titik genangan air pada tahun 2019 yang sudah terselesaikan 20 titik genangan dari 26 titik genangan, sehingga Kota Malang terbebas dari genangan air, untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



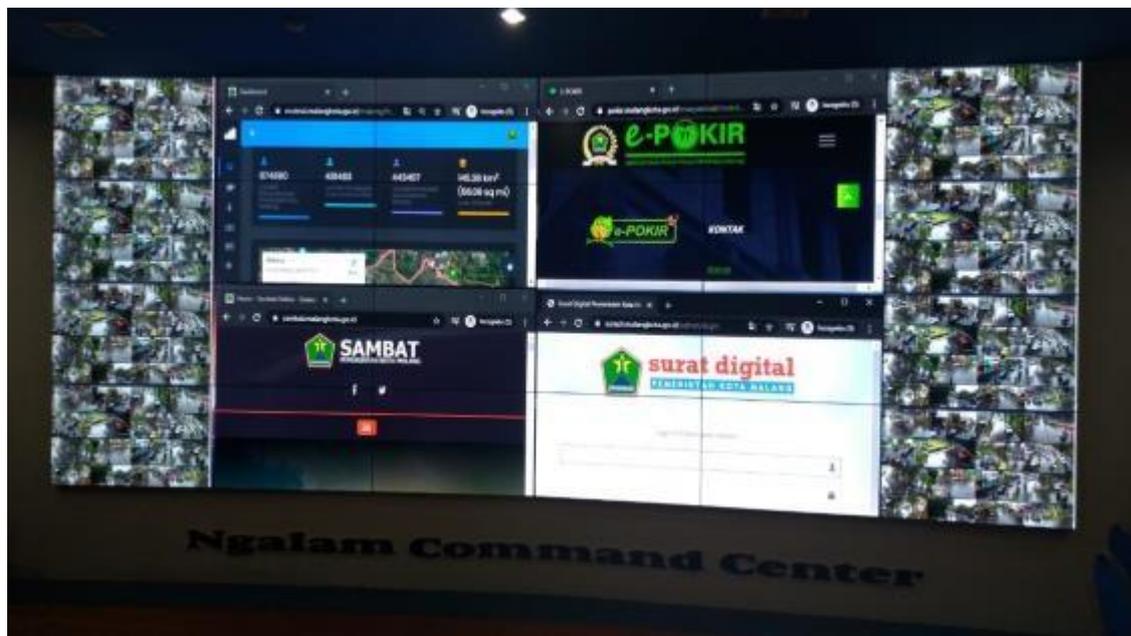


Untuk indikator maturitas SPIP telah dilaksanakan workshop penilaian resiko yang diikuti oleh Pejabat Administrator masing-masing Perangkat Daerah, peningkatan kapasitas APIP dan pembinaan SPIP kepada seluruh perangkat daerah.





Sedangkan untuk Indikator Indeks Kematangan SPBE walaupun ada peningkatan nilai kematangan namun belum memenuhi target, akan dilakukan integrasi sistem perencanaan dan sistem penganggaran menjadi lebih sempurna, yang selama ini sudah ada upaya pengintegrasian tetapi masih ada kendala, dan akan melaksanakan sosialisasi Peraturan Walikota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



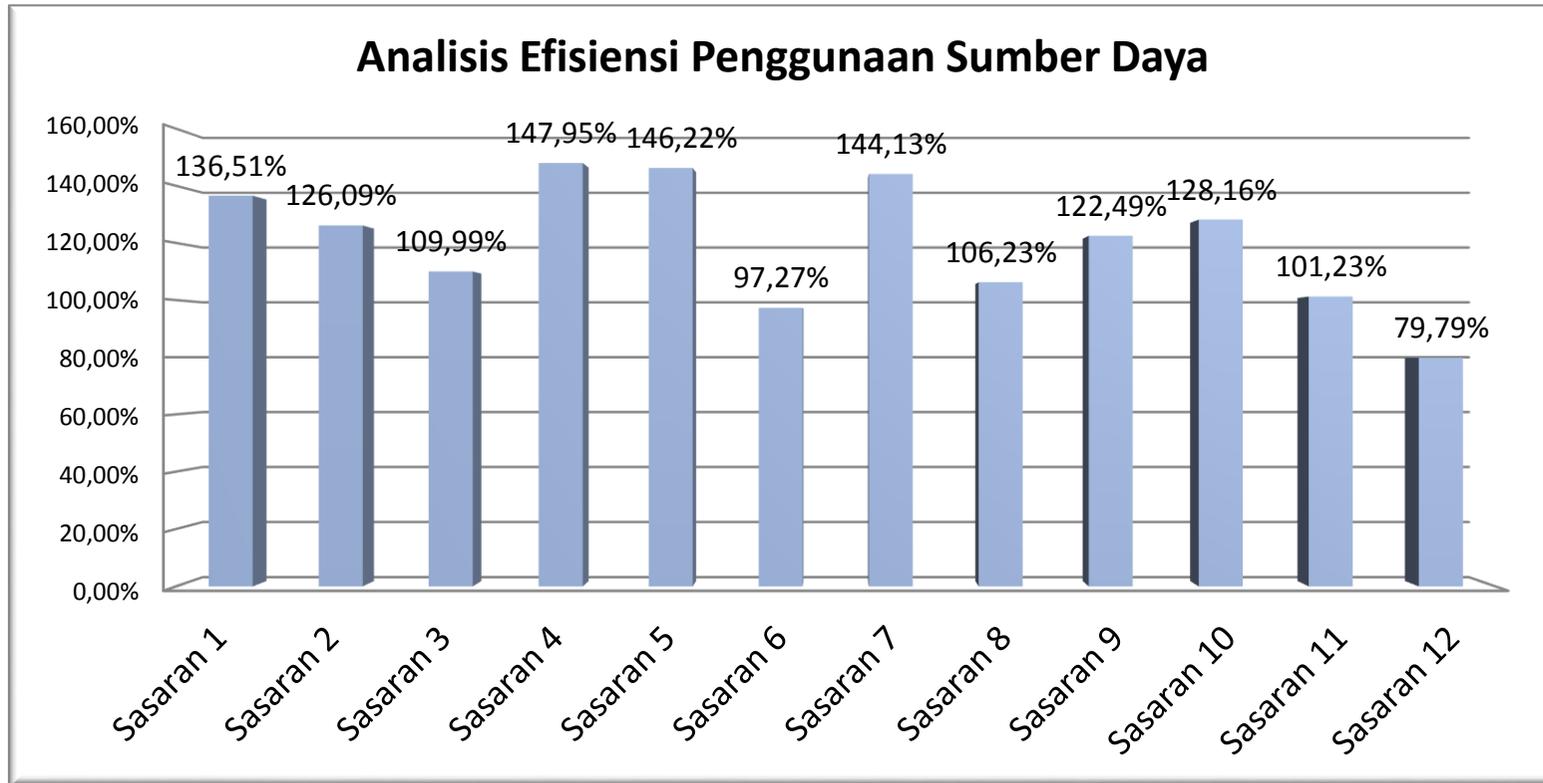


## G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

**Tabel 3.6**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%	efisiensi anggaran
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78	0,77	98%	208.611.820.068,00	149.761.834.215,33	71,79%	136,51%	28,21%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	100%	171.902.576.987,02	136.332.163.354,62	79,31%	126,09%	20,69%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,85	0,85	100%	6.202.013.700,00	5.638.960.918,00	90,92%	109,99%	9,08%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6%	8,10%	135%	41.553.060.738,00	37.915.733.404,00	91,25%	147,95%	8,75%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,9	4,06	104%	303.750.526.196,40	216.039.373.417,00	71,12%	146,22%	28,88%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,92	65,27	79%	57.842.881.490,00	46.975.989.683,00	81,21%	97,27%	18,79%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%	efisiensi anggaran
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
Meningkatnya kualitas perlindungan social	Persentase Penurunan PMKS	5%	6,81%	136%	21.930.610.536,00	20.694.166.460,13	94,36%	144,13%	5,64%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	83,60%	84,63%	101%	91.941.674.000,00	86.114.895.288,32	93,66%	106,23%	6,34%
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	96,8	94,71	98%					
	<b>Rata-rata</b>			<b>99,50%</b>					
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	25%	26,37%	105%	13.841.616.000,00	11.865.329.785,00	85,72%	122,49%	14,28%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	75,65	75	99%	384.049.924.075,00	307.911.354.895,91	80,17%	128,16%	19,83%
	Opini BPK;	WTP	WTP	100%					
	Maturitas SPIP	3,5	3	87%					
	Rasio PAD.	0,24	0,3	125%					
	<b>Rata-rata</b>			<b>102,75%</b>					
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	71,46	66,61	93%	13.142.806.000,00	12.074.259.372,00	91,87%	101,23%	8,13%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	3,8	2,85	75%	21.717.447.000,00	20.414.458.091,00	94,00%	79,79%	6,00%
<b>Jumlah</b>				<b>102,27%</b>	<b>1.336.486.956.790,42</b>	<b>1.051.738.518.884,31</b>	<b>78,69%</b>	<b>129,96%</b>	<b>21,31%</b>



Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efisien penggunaan sumberdaya yang berdasarkan kinerja, rinciannya sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter dengan capaian kinerja 98% dan capaian anggaran 71,79%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 28,21% dan efisiensi penggunaan sumber daya 36,51%
2. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan kesehatan dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 79,31%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 20,69% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 26,09%
3. Sasaran Meningkatnya daya beli dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 90,92%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 9,08% dan efisiensi penggunaan sumber daya 9,99%.
4. Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif dengan capaian kinerja 135% dan capaian anggaran 91,25%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 8,75% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 47,95%
5. Sasaran Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu dengan capaian kinerja 104% dan capaian anggaran 71,12%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 28,88% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 46,22%
6. Sasaran Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup dengan capaian kinerja 79% dan capaian anggaran 81,21%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 18,79% dan inefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,73%
7. Sasaran Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dengan capaian kinerja 136% dan capaian anggaran 94,36%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 5,64% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 44,13%
8. Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan dengan capaian kinerja 99,5% dan capaian anggaran 93,66%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 6,34% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,23%
9. Sasaran Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum dengan capaian kinerja 105% dan capaian anggaran 85,72%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 14,28% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,49%

10. Sasaran Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif dengan capaian kinerja 102,75% dan capaian anggaran 80,17%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 19,83% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 28,16%
11. Sasaran Meningkatnya meritokrasi manajemen ASN dengan capaian kinerja 93% dan capaian anggaran 91,87%, menunjukkan efisiensi anggaran 8,13% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,23%
12. Sasaran Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi dengan capaian kinerja 75% dan capaian anggaran 94%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 6% dan inefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20,21%

Terhadap Sasaran Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) yang menunjukkan inefisiensi penggunaan sumber daya 2,73% disebabkan beberapa faktor dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih belum optimal seperti kegiatan/usaha pengendalian air dan B3, pemantauan kualitas udara, dan belum optimalnya pengelolaan sampah.

Terhadap Sasaran Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi dengan Indikator Indeks Kematangan SPBE yang menunjukkan inefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20,21% karena belum optimalnya integrasi sistem informasi manajemen pada perangkat daerah.

Tindak lanjut yang dilakukan adalah:

- Untuk meningkatkan capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD), dilaksanakan Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS), serta untuk memenuhi target penyelesaian titik genangan air pada tahun 2019 sudah terselesaikan 20 titik genangan dari 26 titik genangan. Sehingga Kota Malang telah terbebas dari genangan air.
- Sedangkan untuk capaian Indikator Indeks Kematangan SPBE walaupun terdapat peningkatan nilai kematangan namun belum memenuhi target, sehingga akan dilakukan integrasi sistem perencanaan dan sistem penganggaran menjadi lebih sempurna. Saat ini sudah dilakukan identifikasi dan verifikasi bahasa pemrograman masing-masing sistem informasi dalam rangka optimalisasi integrasi sistem. Selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi Peraturan Walikota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2020.

Dengan memperhitungkan kinerja pemerintah daerah sebesar 102,27% dengan total anggaran sebesar 78,69%, menunjukkan adanya efisiensi/efektivitas penggunaan dana sebesar 29,96%.

## H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA (PERJANJIAN KINERJA)

Sasaran Tahun 2019 sudah tercapai sesuai dengan target, berbagai upaya telah dilakukan, dari 12 (dua belas) sasaran capaian tertinggi adalah sasaran ke 7 (tujuh) meningkatnya kualitas perlindungan sosial dengan indikator kinerja Persentase Penurunan PMKS yang didukung dengan beberapa program:

- Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor
- Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
- Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Sedangkan Sasaran yang belum mencapai target:

- I. Sasaran 6 Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) capaian kinerjanya 54%, berbagai upaya telah dilakukan melalui pengembangan tata lingkungan hidup, kemitraan dan pengendalian lingkungan hidup, penataan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengembangan kinerja pengelolaan sampah, penataan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas pengolahan sampah, pengelolaan sampah tempat pemrosesan Akhir (TPA), pengurangan dan penanganan sampah, pemeliharaan sarana operasional persampahan, peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan, pengurangan dan penanganan sampah, pemeliharaan sarana dan prasarana operasional persampahan.

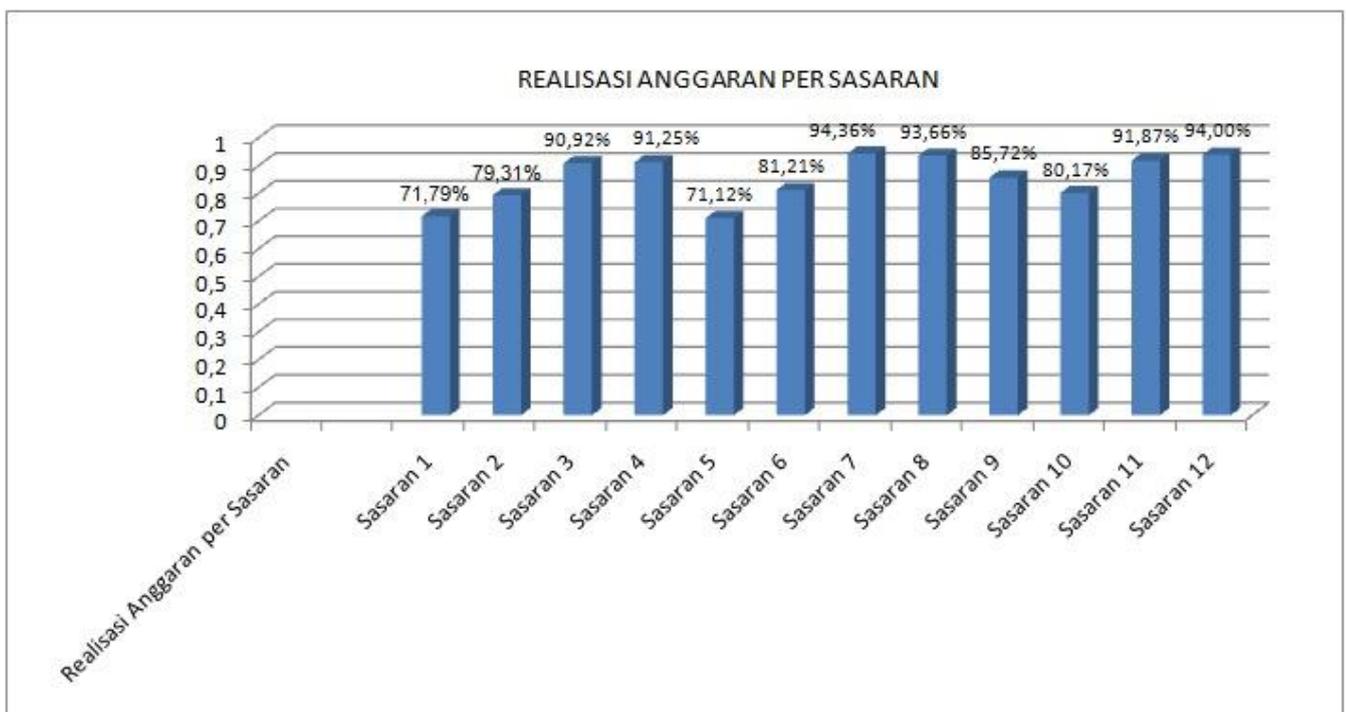
- 2 Sasaran 10 Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif dengan indikator Maturitas SPIP, program diseluruh Perangkat Daerah Pengendalian Internal, dan program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- 3 Sasaran 12 Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi dengan indikator Indeks Kematangan SPBE, program pelayanan dan pengelolaan informasi publik, pengelolaan aplikasi informatika.

## I. REALISASI ANGGARAN

Rata rata realisasi anggaran seluruh sasaran sebesar 78,69 % atau terdapat efisiensi sebesar 21,31%

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran**

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Belanja Pegawai	219.919.879.174,35	196.877.762.799,00	23.042.116.375,35	89,52%
Belanja Barang Dan Jasa	730.643.778.795,56	617.890.671.046,65	112.753.107.748,91	84,57%
Belanja Modal	385.923.298.820,51	236.970.085.038,66	148.953.213.781,85	61,40%
<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>1.336.486.956.790,42</b>	<b>1.051.738.518.884,31</b>	<b>284.748.437.906,11</b>	<b>78,69%</b>





# **BAB 04**

# **PENUTUP**

**LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH KOTA MALANG  
TAHUN 2019**

## Bab 4 Penutup

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga dan masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Malang pada tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan nilai BB (Kategori Sangat Baik).

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang yang menggambarkan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Malang.

Malang, 31 Maret 2020





## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
PEMERINTAH KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78
2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,814
3.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,847
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6 %
5	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,90
6.	Meningkatnya Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,92
7.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Persentase penurunan PMKS	5 %
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,836
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,80
9.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	25 %
10.	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	1. Nilai Sakip	75,65
		2. Opini BPK	WTP
		3. Maturutas SPIP	3,50
		4. Rasio PAD	0,24

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
11.	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	71,46
12.	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	3,8

No.	PROGRAM	PAGU
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,431,735,752.00
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10,088,688,100.00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	14,895,937,835.00
4	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80,093,801,832.00
5	Program Pendidikan Sekolah Dasar	122,873,222,545.60
6	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67,582,642,333.00
7	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,452,434,290.00
8	Program Pendidikan Non Formal	3,337,860,900.00
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,317,032,000.00
10	Program Sarana dan Prasarana SKB	1,144,139,000.00
11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	34,598,376,565.82
12	Program pelayanan kesehatan dasar	31,152,290,162.22
13	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi	15,538,355,000.00
14	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	15,389,831,648.60
15	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	10,164,970,700.09
16	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi	7,027,981,274.80
17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,724,520,000.00
18	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit	4,279,880,230.00
19	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan	4,214,996,904.00
20	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	2,557,000,000.00
21	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	2,047,673,190.00
22	Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	1,523,725,000.00
23	Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	1,321,745,210.09
24	Program Pengawasan Obat dan Makanan	752,005,000.00
25	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	613,086,650.00
26	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	164,362,000.00
27	Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	30,989,723,100.00
28	Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	102,675,922,706.27

No.	PROGRAM	PAGU
29	Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian	69,408,219,762.36
30	Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase	16,324,882,632.24
31	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang	12,574,203,400.00
32	Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	8,320,591,689.28
33	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Jalan	6,943,575,281.20
34	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang	5,405,959,813.00
35	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang	3,284,269,000.00
36	Program Bina Jasa Kontruksi	1,706,170,000.00
37	Program Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	1,182,501,906.85
38	Program Pengembangan/Rehabilitasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1,050,123,000.00
39	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	752,340,000.00
40	Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat	682,000,000.00
41	Program Perencanaan Ruang	384,150,000.00
42	Program Pemanfaatan Tata Ruang	192,840,000.00
43	Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	142,350,000.00
44	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	16,253,117,750.00
45	Program Pengelolaan Penerangan Jalan	9,765,607,732.00
46	Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	7,503,991,000.00
47	Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	6,100,000,000.00
48	Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	2,312,906,625.00
49	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1,194,800,000.00
50	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5,973,160,000.00
51	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	5,147,180,000.00
52	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	3,046,000,000.00
53	Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah	1,938,456,000.00
54	Program Pembinaan Polisi Pamong Praja	860,000,000.00
55	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	12,638,982,000.00
56	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4,686,590,850.00
57	Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,033,875,936.00
58	Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	416,610,000.00
59	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	857,494,550.00

No.	PROGRAM	PAGU
60	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	750,000,000.00
61	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	577,963,250.00
62	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	547,057,200.00
63	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	450,000,000.00
64	Program Keluarga Berencana	4,032,599,000.00
65	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	1,800,000,000.00
66	Program Pemberdayaan Perempuan	1,512,926,500.00
67	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,121,120,000.00
68	Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia	600,000,000.00
69	Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	585,000,000.00
70	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	19,057,828,840.00
71	Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	5,684,430,500.00
72	Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah	2,513,817,000.00
73	Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan	1,892,003,200.00
74	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan	1,393,000,000.00
75	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	621,538,000.00
76	Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.	550,239,000.00
77	Program Pengurangan dan Penanganan Sampah	517,025,900.00
78	Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	509,916,300.00
79	Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.	495,825,000.00
80	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	340,000,000.00
81	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2,846,345,000.00
82	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	2,436,880,000.00
83	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	855,812,000.00
84	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	7,605,510,000.00
85	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2,106,412,000.00
86	Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1,757,084,000.00
87	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1,495,460,000.00
88	Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	1,183,246,000.00
89	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	981,103,000.00
90	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	14,327,768,000.00
91	Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	3,341,810,000.00
92	Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	1,543,275,000.00
93	Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik	975,892,000.00
94	Program Pengelolaan Persandian	249,000,000.00
95	Program pengembangan usaha mikro	1,708,720,000.00

No.	PROGRAM	PAGU
96	Program Pengembangan Koperasi	1,630,613,100.00
97	Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha Mikro (Cukai)	1,145,000,000.00
98	Program Pengawasan Koperasi	486,689,400.00
99	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	923,612,000.00
100	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	463,463,332.00
101	Program Pengolahan Data dan Informasi	423,890,000.00
102	Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	388,380,306.00
103	Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	293,860,000.00
104	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	5,640,823,750.00
105	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	5,367,683,250.00
106	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	1,930,000,000.00
107	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1,733,122,500.00
108	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	596,173,500.00
109	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,446,023,000.00
110	Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	683,450,000.00
111	Program Pengelolaan Arsip Daerah	432,880,000.00
112	Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	2,720,078,000.00
113	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	2,445,720,000.00
114	Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	1,398,210,000.00
115	Pengembangan Potensi Perikanan	934,269,300.00
116	Program Peningkatan Produksi Tanaman	808,550,000.00
117	Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	655,264,000.00
118	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	437,564,400.00
119	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	415,544,000.00
120	Program Peningkatan Produksi Peternakan	230,822,000.00
121	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar	22,152,613,000.00
122	Pengembangan Usaha Perdagangan	1,385,000,000.00
123	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrolgian	560,000,000.00
124	Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar	560,000,000.00
125	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	470,000,000.00
126	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai)	305,000,000.00
127	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	2,635,330,000.00
128	Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	2,237,370,350.00
129	Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	774,130,000.00
130	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka (Cukai)	700,000,000.00

No.	PROGRAM	PAGU
131	Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	664,500,000.00
132	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai)	635,000,000.00
133	Program Pembinaan Industri (Cukai)	160,000,000.00
134	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui forum tatap muka (Cukai)	65,000,000.00
135	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4,323,796,000.00
136	Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	3,445,000,000.00
137	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam	2,360,726,000.00
138	Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah	2,182,179,600.00
139	Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	1,664,852,100.00
140	Program Penyusunan Anggaran Daerah	2,798,119,700.00
141	Program Pemanfaatan Aset Daerah	2,329,250,000.00
142	Program Penatausahaan Aset Daerah	2,249,613,000.00
143	Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah	2,231,727,100.00
144	Program Pelaporan Keuangan Daerah	1,039,869,700.00
145	Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	6,452,618,825.00
146	Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah	2,741,351,900.00
147	Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	2,689,080,000.00
148	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	7,935,558,500.00
149	Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian	2,707,845,000.00
150	Program Pembinaan Kepegawaian	1,157,512,500.00
151	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	432,290,000.00
152	Program Fasilitasi Pemberhentian Pegawai	169,800,000.00
153	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	3,930,000,000.00
154	Program Penerapan dan Penegakan Hukum	3,720,000,000.00
155	Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	1,350,000,000.00
156	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1,355,000,000.00
157	Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	739,800,000.00
158	Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2,553,345,000.00
159	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	820,000,000.00
160	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	34,970,200,000.00
161	Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga	10,125,000,000.00
162	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4,319,360,000.00
163	Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur	565,000,000.00
164	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I	2,083,055,000.00

No.	PROGRAM	PAGU
165	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	1,212,345,150.00
166	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	1,023,175,800.00
167	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV	798,541,600.00
168	Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29,316,210,000.00
169	Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24,491,449,180.00
170	Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan/Anggota DPRD	5,461,573,000.00
171	Program Kewaspadaan Daerah	2,643,000,000.00
172	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1,147,058,100.00
173	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	945,000,000.00
174	Program Pemberdayaan Ormas dan LSM	175,000,000.00
175	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	2,821,735,000.00
176	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	1,977,623,000.00
177	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1,519,357,000.00
178	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	46,860,698,900.00
179	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	39,723,878,200.00
180	Program Pemberdayaan Masyarakat	17,595,237,200.00

Malang, 26 September 2019





WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Malang, 31 Maret 2020

Nomor : 713/ 991 /35.73.133/2020  
Sifat : Amat Segera  
Lampiran : 1 (satu) buku  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja  
Pemerintah Kota Malang Tahun 2019

Kepada  
Yth. Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi  
di  
**JAKARTA**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan:

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;  
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta;  
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.